PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

Konteks Sosio-Historis Pendidikan Islam:

Sebuah Refleksi Dialektis

Oleh:

Khoirun Niam

(Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Alumni Institut für Islamwissenschaft, Freie Universität, Berlin)

DISAMPAIKAN PADA

HALAQAH PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

TANGGAL 26 – 27 AGUSTUS 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

Konteks Sosio-Historis Pendidikan Islam: Sebuah Refleksi Dialektis

Oleh: Khoirun Niam

Pendahuluan

Perubahan sosial melalui jalur pendidikan telah memasuki wilayah aksi nyata di samping tetap menjadi adagium penting di kalangan filosuf. Apa yang tampak di lingkungan kita membuktikan betapa pendidikan mempunyai kontribusi cukup penting dalam proses perubahan. Contoh klasik yang dapat disebut adalah peran Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara dan seorang ulama Haji Mas Mansur dalam mempersiapkan dan menentukan pilihan Indonesia merdeka serta dalam perjalanan sejarah mengawal, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.[1] Tokoh-tokoh itu adalah kalangan terdidik pada masanya yang berusaha memerankan diri dalam proses-proses perubahan yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dr. Wahidin Soediro Husodo adalah tokoh lain yang datang sebelum Soekarno-Hatta. Melalui peran yang ditampilkannya – dengan didirikakknya Budi Utomo (20 Mei 1908)[2]-- Indonesia menandai adanya masa kebangkitan yang saat ini (tahun 2008) telah genap berusia 100 tahun. Apa yang mereka perankan adalah bukti aksi nyata perubahan yang dilakukan oleh kalangan terdidik atau yang disebut dengan kaum intelektual sebagai hasil dari proses pendidikan yang mereka peroleh sebelumnya.

Para filosuf tidak kalah pentingnya dipandang sebagai pembawa perubahan di dunia ini. Pandangan ini sebagaimana diungkapkan oleh Karl Marx: *"Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern"* (dalam memandang dunia para filosuf hanya berbeda dalam melakukan interpretasi, namun tergantung pada merekalah perubahan dunia ini). Adagium itu diabadikan sebagai prasasti yang terpampang besar di pintu masuk salah satu gedung tua *(alte Gebeude)* Humbold Universität Berlin di jalan Unter den Linden, dimana Karl Marx pernah menjadi mahasiswa dan mengajar.[3] Maksud dipampangkannya adagium itu adalah agar orang-orang yang terlibat dalam pendidikan mempunyai semangat dan kesadaran untuk selalu melakukan perubahan penting di dunia ini walau terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Perubahan bisa dilakukan dengan cara revolusi (secara pelan dan sistematis) maupun evolusi (secara cepat dan radikal). Namun apa yang terpampang di pintu gerbang Melbourne University menunjukkan bahwa perguruan tinggi ini memproklamirkan diri sebagai lembaga perubahan yang memilih jalur evolusi. Adagium *"The Evolution Starts Here"* sebagaimana pada gambar di bawah diharapkan mampu memberikan citra dan semangat perubahan melelui jalur pendidikan.

---

[1] Wiratmo Soekito, *Kaum Intelektual dan Teknokrat: Mencari Definisi*, pengantar buku dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (eds.), *Cendekiawan dan Politik*, LP3ES, Jakarta, 1984, hal. xvi.

[2] Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Indonesia 1900 – 1942*, LP3ES, Jakarta, 1996, hal. 84-85.

[3] Khoirun Niam, *Islam dan Demokrasi: Catatan atas Keragaman Pemikiran*, Makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam Laucing dan Seminar Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 22 September 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Foto by Kh. Niam 2006

Salah satu gerbang kampus Melbourne University, Australia

Dalam pandangan Islam sebenarnya Nabi Muhammad telah memberikan jalan kepada umat Islam untuk melakukan praktek pendidikan sesuai dengan tantangan zaman di mana anak didik akan tumbuh dan berkembang. Sabda Nabi *'allimū aulādakum fainnahum makhlūqūna lizamanin ghaira zamanikum* (didiklah anakmu karena mereka itu adalah makhluk-makhluk yang akan hidup pada zaman yang berbeda denganmu), mengisyaratkan bahwa pendidikan itu selayaknya jauh menjangkau masa depan yang tentu akan berkembang dan berubah. Oleh karena itu anak didik perlu dibekali dengan kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan. Di kalangan santri pondok modern Gontor Ponorogo juga terdapat semangat untuk melakukan perubahan dengan menanamkan ungkapan *min hunā nabda'* (dari sini kita mulai –perubahan-).

Bahasan ini akan diawali dengan pemaparan konteks sosio-historis orientasi pendidikan untuk dapat memetakan bagaimana perubahan orientasi pendidikan yang terekam dalam lintasan sejarah berbagai bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan sajian kaitan antara perubahan sosial dengan lembaga pendidikan untuk mendapatkan gambaran di mana letak lembaga pendidikan dalam suatu proses perubahan. Refleksi dialektis untuk menilai dan menganalisa tantangan lembaga pendidikan Islam di era yang berubah diperlukan untuk mendapatkan pandangan inti dari kajian ini yang kemudian diakhiri dengan beberapa pandangan dan tawaran berkaitan dengan solusi permasalahan pendidikan Islam masa depan.

Konteks sosio-historis Orientasi Pendidikan

Untuk apakah sebernarnya pendidikan yang diusahakan oleh negara dan masyarakat ini? Untuk mendidik tukang-tukang dalam arti untuk kepentingan pragmatis atau untuk kepentingan idealistis berupa pemberian ilmu pengetahuan yang tidak perlu mempertimbangkan apa bisa diterapkan secara langsung di masyarakat atau tidak. Ataukah pendidikan itu dijadikan media untuk mengeruk keuntungan ekonomi dari para penyelenggaranya? Dalam kaca mata historis memang orientasi dan tujuan pendidikan itu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Masing-masing masa mempunyai ciri khas dan orientasi yang berbeda sesuai dengan kondisi perkembangan dan tantangan zamannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman Mesir purba --yang telah mengenal peradaban tinggi-- misalnya tujuan pendidikannya diorientasikan pada nilai kesusilaan dan keagamaan yang bermuara pada i'tikad untuk berbakti pada dewa-dewa.[4] Namun yang menyelenggarakan pendidikan bukanlah negara dan masyarakat luas seperti sekarang ini tetapi para pendeta dan hanya prajurit dan pendetalah yang bisa menikmati pedidikan. Di India pada masa kuno terdapat kemiripan dengan mesir dari sisi menomorsatukan pengajaran agama dan penyelenggara pendidikannya, yaitu mereka yang menduduki kasta tertinggi (Brahmana). Kasta yang terendah tidak mendapatkan pendidikan hanya tiga kasta pertama yang mendapatkan pendidikan (Brahmana, Ksatria dan Waisya).[5] Di sini jelas terdapat pembedaan siapa yang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak diperuntukkan bagi semua orang dan diarahkan pada kepentingan pembinaan keagamaan. Perubahan orientasi terjadi di India ketika Rabindranath Tagore (1861–1941) melakakun usaha-usaha perubahan pendidikan untuk mewujudkan persaudaraan sedunia dengan tanpa mengenal perbedaan kasta, warna kulit, bangsa dan agama.

Lain halnya dengan apa yang terjadi di Cina pada zaman purba, masalah-masalah pendidikan tidak dihubungkan dengan agama, tetapi tradisi dan kehidupan praktis. Bukan kuil atau institusi keagamaan yang diutamakan melainkan negara; bukan pendeta yang dihormati melainkan leluhurnya. Sejak 2200 sebelum Masehi negara (kerajaan) dan keluarga telah menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan mereka ditujukan untuk mendidik kepala-kepala keluarga yang baik, suami yang setia, anak yang patuh, pegawai-pegawai yang rajin, warga negara yang jujur dan rela berbakti, raja-raja yang arif-bijaksana dan tentara yang gagah berani. Dengan begitu pendidikan mereka diarahkan pada kepentingan praktis dan pragmatis. Sampai sekarangpun dampaknya masih bisa dilihat, terbukti banyak orang Cina yang tidak menempatkan agama sebagai unsur penting dalam pendidikan. Ketika studi di Jerman (1997-2003) penulis sering bertukar fikiran dengan beberapa mahasiswa dari Cina, pendapat mereka menunjukkan penolakan akan perlunya agama dalam kehidupan ini.

Di dataran Eropa khususnya Yunani pada zaman purba (± tahun 900 SM) yang pusat kebudayaanya ada di kota Sparta pendidikan ditujukan untuk membentuk serdadu-serdadu pembela negara.[6] Anak adalah milik negara dan pendidikan diselenggarakan oleh negara. Hanya warga negaranya saja yang berhak mendapatkan pendidikan. Anak-anak yang sudah berumur tujuh tahun dimasukkan ke dalam asrama negara. Apa yang terjadi di Romawi, pada awalnya, tujuan pendidikannya sama dengan di Yunani, terutama ketika Romawi berusaha memperluas wilayahnya. Pendidikan ditujukan untuk membentuk manusia yang selalu siap berkorban membela kepentingan tanah airnya dan diutamakan untuk membentuk warga negara yang cakap sebagai tentara. Baru setelah filsafat Epicurisme yang dikembangkan oleh Epicuros (341-270 SM) dan filsafat Stoa yang dikembangkan oleh Zeno (336-264 SM) orientasi pendidikannya berubah dari yang mengedepankan nilai-nilai kepahlawanan ke nilai kemanusiaan.

Kemudian munculnya Kristen di dataran Eropa memberikan warna baru. Kebudayaan Yunani-Romawi berangsur-angsur mendapatkan pola baru dan cap kebudayaan Nasrani. Orientasi pendidikan yang diarahkan pada nilai-nilai agama mendapatkan momentum

---

[4] I Djumhur dan Drs H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan*, CV Ilmu, Bandung, tt., hal. 4.
[5] Ibid., hal. 5.
[6] Ibid., hal. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali. Pandangan pentingnya adalah bahwa tujuan hidup manusia tidak terletak di dunia fana ini (*diesseitig*) tetapi alam baka kelak *(jenseitig)*. Agama, khususnya Kristen Katholik, menjadi pusat segala pengajaran dan pengetahuan. Sampai datangnya zaman Renaissance (±1450-1600) yaitu kelahiran kembali kebudayaan klasik. Orang berorientasi kembali ke bahasa Latin dan Yunani serta filsafatnya.[7] Dengan cara itu diharapkan orang bisa terlepas dari ikatan abad pertengahan yang mementingkan sisi *Jenseitigkeit* dari pada *Diesseitigkeit*. Cita-cita untuk menjadi pendeta ditinggalkan dan cita-cita manusia diarahkan ke masa jayanya Republik Romawi yang mendorongnya mempelajari pelbagai pengetahuan. Aliran humanisme lebih mendominasi dari pada paham yang menempatkan pentingnya agama. Ukuran kebenaran, keindahan dicari dan didapatkan pada manusia. Tuhan sebagai pusat norma tertinggi ditinggalkan.

Zaman Renaissance yang mengedepankan sisi humanisme ini akhirnya ditindaklanjuti oleh aliran Realisme pada tahun 1600. Aliran baru ini mengarahkan perhatian pada dunia nyata, kepada alam dan benda-benda sebenarnya yang memunculkan ilmu-ilmu kealaman. Pendidikan berorientasikan kepada nilai keagamaan semakin dipinggirkan dengan munculnya gerakan pencerahan (A*ufklärung*) pada abad ke 18. Pada abad ini manusia ingin bebas dari ikatan gereja, tradisi dan dari absolutisme negara. Manusia percaya pada akal budinya, karena itulah abad ini disebut juga dengan abad rasionalisme. Negara dituntut untuk menyelenggarakan pengajaran yang lepas sama sekali dari pengaruh gereja. Gerakan yang akhirnya memunculkan paham sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dan bukan agama.

Kemudian bagaimana yang terjadi di kilasan sejarah pendidikan Indonesia? Pada zaman penjajahan pendidikan ditujukan untuk kepentingan praktis pragmatis yaitu untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang diperlukan oleh pihak penjajah.[8] Pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan religious dilakukan secara tidak resmi dalam bentuk kursus-kursus ataupun dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintahan Belanda. Namun begitu ada pula sekolah-sekolah agama yang mendapatkan subsidi Belanda, tetapi lebih banyak diorientasikan pada sekolah-sekolah Kristen sebagai usaha mengkristenkan kaum pribumi. Diantara sekolah agama yang mendapatkan subsidi dari Belalnda adalah sekolah di bawah naungan Muhammadiyah, di mana pada tahun 1915 pemerintah kolonial Belanda memberikan subsidi karena sekolah Muhammadiyah dianggap memenuhi persyaratan Belanda.[9] Pada mulanya penjajah Belanda hanya memberikan kesempatan pendidikan

---

[7] Bandingkan dengan Ruggiero Romano dan Alberto Tenenti (ed.), *Welt Geschichte, Die Grundlegung der modernen Welt, Spätmittelalter, Renaissance, Reformation,* Ausburg, 2000. Sedangkan untuk kajian reformasi pendidikan pada kurun waktu tahun 1980an dan 1990an lihat Heinz Sünker, Dieter Timmermann, Frtiz-Ulrich Kolbe (eds.), *Bildung, Gesellschaft, soziale Ungleichheit,* Frankfurt am Main, 1994.

[8] Bandingkan dengan Furnivall, J.S, *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India,* New York University Press, 1956. begitu juga tulisannya *Netherlands India,* Cambridge at the University Press, 1975. Politik etis menjadi bagian penting dari upaya balas budi kaum penjajah pada Indonesia di awal tahun 1900an. Masalah ini dapat di lihat di Kahin, George McTurnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia,* Cornell University Press, Ithaca and London, 1970.

[9] D. Rinkes, *Bescheiden betreffende de Vereeniging Sarekat Islam*, Zeer Geheime Missive van den Adviseur voof Inlandsche Zaken aan den Gouverneur-General, dalam Robert van Niel, *The Emergence of the Indonesian Modern Elite*, The Hague and Bandung, 1960, hal. 166. Lihat pula HS Shafiuddin, The 41st Congress of Muhammadiyah: A Retrospection, The Indonesian Times, 14 November 1985, dalam M. Rusli Karim (ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar*, Rajawali, Jakarta, 1986, khususnya hal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada para putra bangsawan dan orang kaya saja, namun kemudian setelah adanya politik balas budi (politik ethik) pendidikan yang berorientasi ke rakyat kecil juga dilakukan. Setelah Indonesia merdeka diusahakanlah penyeimbangan antara pendidikan yang berorientasi religious dan pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan kekinian.[10] Tetapi masih juga terdapat tarik menarik kepentingan keduanya yang mengakibatkan ada kegagapan dalam menentukan orientasi.

Dari kilasan sejarah di atas jelas terlihat betapa orientasi dan tujuan pendidikan itu berubah-ubah dan silih berganti dari yang mementingkan nilai-nilai keagamaan *(religious values)* kepada kepentingan praktis pragmatis, nilai humanis, rasionalis, realistis dan sekularis. Perubahan ini seiring dengan tantangan dan perkembangan zamannya atau dengan kata lain seirama dengan konteks sosio-historisnya.

Perubahan Sosial: Di mana Letak Lembaga Pendidikan?

Perubahan sosial *(social change)* menurut Giddens adalah ungkapan sosiologis yang sulit untuk didefinisikan. Demikian ini karena segala hal itu akan mengalami perubahan pada setiap saat sesuai dengan kadar dan ukurannya. Kutipan berikut menguatkan paparan di atas.

> "Social change is difficult to define, because there is a sense in which everything changes, all of the time. Every day is a new day; every moment is a new instant in time. The Greek philosopher Heraclitus pointed out that a person cannot step into the same river twice. On the second occasion, the river is different, since water has flowed along it and the person has changed in subtle ways too".[11]

Secara esensial pernyataan pada kutipan di atas dapat dibenarkan, namun tentu dalam benak kita akan timbul keinginan untuk menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang menyeberangi sungai dua kali, seperti digambarkan filosuf Yunani Heraclitus, adalah "orang" dan "sungai" yang sama; yang diseberangi pada dua kesempatan berbeda. Terdapat hal-hal yang sama secara kualitatif apa yang ada pada diri orang yang menyeberangi sungai itu, misalnya kenyataan bahwa orang tersebut akan basah kakinya ketika menyeberang dalam dua kesempatan berbeda. Yang berbeda adalah tingkat atau kuantitas air yang membasahi kaki orang yang menyeberang. Dengan demikian terdapat sisi perubahan secara kuantitatif berupa peningkatan atau increase *(auxēsis)* dan penurunan atau decrease *(phthisis)*.[12]

Kuantitas perubahan ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan Aristoteles ketika menjelaskan cakupan perubahan. Ia berpendapat bahwa perubahan itu mencakup empat hal:

---

335. Bahasan tentang seluk beluk pendidikan pada masa pemerintah kolonial Belanda lihat S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia,* Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

[10] Bahasan tetang sejarah pendidikan Islam di Indonesia lihat Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2007; Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya,* Logos, Jakarta, 1999; Samsul Nizar (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidkan Era Rasulullah sampai Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2007; Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam,* Rajawali Pers, Jakarta, 2004; Suwito dan Fauzan (eds.)., *Sejarah Sosial Pendidikan Islam,* Kencana, Jakarta, 2005; Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam,* Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

[11] Anthony Giddens, *Sociology,* Polity Press, Cambridge, 2006, hal. 43-46.

[12] Terminologi ini dipinjam dari ungkapan Aristoteles. Lihat J.A.K. Thomson, *Aristotle Ethics,* Penguin Book, London, 1976, hal. 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Change *(metabolē)* is either (1) of substance, viz. coming to be *(genesis)* and ceasing to be *(phthora)*; or (2) of quality, viz. alteration *(alloiōsis)*; or (3) of quantity, viz. increase *(auxēsis)* and decrease *(phthisis)*; or (4) of place, viz. locomotion *(phora)*.[13]

Perubahan itu mencakup subtansi isi, kwalitas, kwantitas dan lokasi atau tempat dari suatu hal. Dalam hal substansi perubahan dapat mengarah pada "menjadi sesuatu" atau justru "menjadi tiada". Sedangkan perubahan dalam hal kwalitas dapat berupa pengembangan. Kemudian perubahan secara kwantitas dapat mengarah pada peningkatan atau bahkan penurunan. Perubahan juga dapat berkaitan dengan lokasi atau posisi suatu hal. Pertanyaan yang kemudian perlu diajukan dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan adalah di posisi manakah lembaga pendidikan akan berubah? Apakah pada sisi substansi, kwalitas, kwantitas atau bahkan pada sisi gerak dan langkah lembaga ke tingkat dan suasana berbeda? Atau lebih konkritnya pertanyaan dapat dikemukakan mampukah lembaga pendidikan menjawab tantangan, tuntutan masyarakat? Apakah lembaga pendidikan satu-satunya institusi yang dapat mengantarkan anak ke arah kedewasaan dan kemandirian? Apakah sekolah justeru berperan sebagai lembaga pewarisan nilai, idiologi dan arah politik tertentu di mana kebebasan dan ruang publik semakin sempit? Mampukah lembaga pendidikan menjadi tempat tumbuh kembangnya pengetahuan dan teknologi atau justru sebagai lembaga penghambat kemajuan karena pilihan pada posisi mempertahankan kwalitas dan kwantitas tradisional? Mampukah sekolah menjadi jembatan untuk menuju kemakmuran penduduk atau sebaliknya justru menciptakan pengangguran terdidik karena bidang keilmuan dan profesionalitasnya tidak sesuai dengan tuntutan lapangan kerja sehingga berujung pada pemiskinan umat? Pertanyaan-pertanyaan di atas, kalau ditelusuri akar cakupan perubahan sebagaimana pendapat Aristoteles, akan dapat menunjukkan di mana letak lembaga pendidikan di tengah perubahan.

Permasalahan berkaitan dengan eksistensi lembaga pendidikan di masyarakat, misalnya, ternyata di kalangan masyarakat sendiri terdapat pertanyaan bernada skeptis akan eksistensi dan peran yang ditampilkan dalam mendidik anak, di samping pengakuan akan peran strategis sekolah yang diwujudkan dengan adanya ketaatan memasukkan anak ke berbagai lembaga pendidikan. Salah satu contoh pandangan skeptis adalah apa yang dipertanyakan Torsten Husén dalam bukunya *The School in Question* (1976). Buku yang membidik permasalahan kaitan antara sekolah dengan masyarakat Barat ini di antaranya mempertanyakan *"has the school the right to educate?"* [14] Husén merangkum pendapat skeptis Carl Bereiter (1973) dalam bukunya *Must We Educate?* sebagai berikut:

> "He doest not question the necessity of having an instituion that provides basic skill and knowledge. He does question, however, the right of the school to 'educate', to impose on all children the prevailing the mode of behaviour and valuation. Such claims are not compatible with the ethos of free, pluralistic society. The salient feature of the school in modern society is the prerogative of the state to provide an education which leaves no room for young people to try out their own ways and to learn from their own mistakes".[15]

Yang dipertanyakan Bereiter adalah hak istimewa sekolah untuk menanamkan nilai dan prilaku tertentu pada semua anak. Hal ini, menurut Bereiter, tidak sesuai dengan semangat kebebasan dan kondisi masyarakat plural. Negara memang mempunyai hak

---

[13] J.A.K. Thomson, *Aristotle Ethics*, Ibid., hal. 355.
[14] Torsten Husén, *The School in Question*, New York, 1979, hal. 34.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prerogratif atas tersedianya pendidikan, namun yang perlu ditekankan, dalam pandangan Bereiter, adalah kesempatan bagi anak didik untuk berlatih sesuai dengan cara yang mereka pilih dan untuk belajar dari kesalahan sendiri.

Apa yang tertuang dalam pandangan Bereiter di atas mewakili mereka yang ingin mempertanyakan peran lembaga pendidikan dalam masyarakat. Berbeda dengan ini, Bowles dan Gintis (1976) memandang pentingnya lembaga pendidikan khususnya di masyarakat yang telah digempur dengan kepentingan dan suasana kapitalis.

> "The formal system of schooling, according to the correspondence principle, is set up in order to reproduce the existing social and economic order. The schools are organized in the same way as modern corporations with the purpose of 'educating' young people to become disciplined and docile workers. The school, then, exist to prepare young people for their future roles in the capitalist economy. They are sorting and sifting institutions which distribute status. The 'technocratic-meritocratic' ideology of equal educational opportunity serves as a kind of opium for the people".[16]

Gagasan ini mewakili ilmuwan kelompok Neo-Marxist[17] yang memandang bahwa lembaga pendidikan mempunyai peran untuk mendidik anak menjadi pekerja handal dan disiplin sejalan dengan ciri masyarakat kapitalis modern, di mana perusahaan-perusahaan mempunyai kepentingan untuk itu. Dengan demikian keberadaan sekolah dibutuhkan dalam rangka untuk mempersiapakan peran mereka di tengah masyarakat berciri ekonomi kapitalis. Pendidikan akan mengarahkan anak didik ke berbagai status sosial yang berbeda. Pandangan akan pentingnya kesamaan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dianggap hanya sebagai *opium for the people*. Oleh karena itu menurut kelompok ini bukan kesamaan mendapatkan pendidikan yang menjadi masalah tetapi perbedaan keterampilan anak didik yang dapat diserap oleh kepentingan pasar pada akhirnya nanti. Dari sini jelas bahwa lembaga pendidikan harus dapat menempatkan diri pada posisi pemberian bekal anak didik sehingga mampu terserap dalam konteks kehidupan sosial ekonomi yang akan berubah.

Perubahan pada tataran isi, substansi dan lokasi lembaga pendidikan memang akan berimplikasi pada banyak hal. Tentunya lembaga pendidikan harus dapat merespon dan menempatkan diri pada posisi yang tepat. Banyak tantangan sosial yang dihadapi lembaga pendidikan. Tidak saja pada peran dan eksistensinya di tengah masyarakat, tetapi juga kaitannya dengan politik, idiologi dan tata nilai, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industrialisasi, masalah kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. Dari sisi lokasi, apa yang dihadapi oleh negara maju akan berbeda masalahnya dengan apa yang menjadi tantangan negara berkembang.[18] Apa yang selalu hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat agamis, akan berbeda tantangan, nuansa perubahan yang akan dihadapi lembaga pendidikan dibanding masyarakat sekuler. Mayoritas negara yang berpenduduk muslim dengan negara yang penduduk muslimnya minoritas, tentu akan mempunyai tantangan berbeda yang dihadapi dunia pendidikan. Oleh karena itu idealnya lembaga pendidikan harus mampu menembus sekat kepentingan lokal seraya menawarkan kondisi yang memungkinkan anak didik

---

[16] Samuel Bowles dan Herbert Gintis, *Schooling in Capitalist America: Educational Reform and the Contradictions of Economic Life*, Routledge and Paul Keagen, London, 1976 sebagaimana dikutip Torsten Husén, *The School in Question*, New York, 1979, hal. 28.

[17] Torsten Husén, *The School in Question*, Ibid. hal 27 – 28.

[18] Mengenahi hal ini lihat Peter J. Opitz, *Die Dritte Welt in der Krise: Grundprobleme der Entwicklungsländer*, C.H. Beck, München, 1984 begitu juga Heinz Sünker, Dieter Timmermann, Frtiz-Ulrich Kolbe (eds.), *Bildung, Gesellschaft, soziale Ungleichheit*, Frankfurt am Main, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu survive pada konteks waktu dan tempat di mana ia akan hidup. Namun tuntutan ideal ini akan sulit diwujudkan mana kala gerakan perubahan yang terjadi berada pada dua kutub berbeda. Apabila perubahan memunculkan adanya kontradisksi antara yang semestinya dipertahankan dan yang semestinya berubah, antara nilai tradisional dengan nilai yang baru. Penyelesaian pragmatis dari kondisi seperti ini adalah lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan konteks sosial di mana ia berada sehingga outcomenya akan secara fungsional dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi kehidupannya.

Tantangan Pendidikan Islam di Era yang Berubah

Kalau gambaran tantangan lembaga pendidikan akan bervariasi di era yang berubah ini, sebagaimana paparan di atas, maka pendidikan Islampun akan menghadapi hal yang sama. Dilihat lebih dekat, di negara-negara berpenduduk muslim, baik muslim sebagai mayoritas ataupun minoritas, tantangan-tantangan itu terbentang mulai dari bernuansa pilihan dilematis antara berorientasi ke "Mekkah" atau ke "London", antara mempertahankan tradisi atau mengadopsi hal baru yang berlawanan dengan tradisi, antara kepentingan kapitalis-industrialis atau agraris, antara pewarisan nilai Islam fundamental atau nilai Islam plural, sampai pada mementingkan pilihan duniawi atau ukhrawi.

Apa yang terjadi di Turki misalnya, letak geografis yang dekat dengan Eropa dan kondisi sosial, ekonomi, politik saat ini menghadapkan pada pilihan dilematis antara berorientasi pada arah kultural Eropa atau kepentingan preservasi nilai dan tradisi Islam Mekkah, sebagaimana dulu talah dibuktikan oleh sejarah bahwa Turki dulu telah mempunyai kekuatan, kekuasaan dan peradaban besar dengan mengedepankan nilai dan peradaban Islam. Bassam Tibi, Ilmuwan politik Jerman yang dilahirkan di Damaskus tahun 1944, mengulas begitu detail masalah ini dalam bukunya *Aufbruch am Bosporus: Die Türkei zwischen Europa und dem Islamismus* (1998).[19] Inti buku ini menggambarkan kondisi Turki saat ini yang berada di bawah bayang-bayang kebesaran warisan Islam saat Turki Usmani jaya dan pengaruh kemajuan masyarakat ekonomi Eropa. Ketika pilihan dijatuhkan pada arah sekularisasi dan westernisasi, sebagai reaksi atas dominasi eropa, maka tentu mempunyai implikasi pada redupnya bayang-bayang kemajuan zaman Turki Usmani. Oleh karena itu perubahan orientasi politis kultural ini akan banyak mempengaruhi corak dan sistem pendidikan Islam yang akan diterapkan.

Dilema dalam menentukan pilihan corak pendidikan Islam bagi masyarakat Turki lebih tampak lagi ketika kenyataan menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang bermigrasi ke berbagai negara maju di Eropa. Keberadaan mereka di tengah mayoritas kristen Eropa mengharuskan untuk berhadapan dengan kultur berbeda, tuntutan ekonomi yang jelas, kondisi masyarakat yang lebih hetorogin dan plural. Tradisi dan nilai Islam menjadi taruhan bagi mereka, dalam hal haruskah nilai dan tradisi Islam diwariskan pada generasi penerus di tengah mayoritas masyarakat Barat yang kristen? Ataukah mereka bebaskan generasi penerusnya berintegrasi dengan budaya dan kultur Eropa?

Pilihan melanjutkan tradisi Islam, nampaknya di lembagakan dalam bentuk pendidikan Islam formal dan informal. Pada wilayah formal inilah tantangan konkrit mucul, mulai

[19] Bassam Tibi, *Aufbruch am Bosporus: Die Türkei zwischen Europa und dem Islamismus,* Diana Verlag, München Zürich, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari fasilitas yang akan dibangun berupa masjid atau sekolah yang ternyata tidak begitu mudah untuk mendapatkan ijin mendirikan masjid sebagai tempat beribadah dan mendidik anak-anak muslim, walau banyak kalangan yang akhirnya berhasil mendapatkan ijin.

Tantangan lain adalah haruskah pendidikan Islam terintegrasi dengan sistem pendidikan formal yang telah ada? Di berbagai negara bagian di Jerman kebanyakan integrasi pendidikan (agama) Islam di sekolah formal banyak mengalami kendala. Mereka lebih memilih untuk mengajarakan etika dari pada pelajaran agama. Namun begitu ada beberapa negara bagian yang mengijinkan dengan pertimbangan banyaknya jumlah anak yang menghendaki diberikannya pelajaran agama Islam di sekolah. Ketika ijin didapatpun tantangan masih ada berupa materi apa yang boleh diajarkan dalam mata pelajaran agama Islam. Terutama setelah peristiwa teror terhadap Barat dan Muslim dituduh berada dibalik serangan teror 11 September 2001. Mereka khawatir kalau ajaran tentang jihad disebarluskan melalui pendidikan. Permasalahn teknis lain juga muncul terkait siapa guru yang harus mengajar dan siapa pula yang akan memberi gaji. Masalah ini terus saja bergulir, dan yang jelas menjadi tantangan bagi komunitas minoritas muslim ditengah mayoritas non muslim.

Tantangan di kebanyakan dunia muslim termasuk Indonesia berada pada seputar antara mempertahankan tradisi atau mengadopsi hal baru yang berlawanan, antara kepentingan kapitalis-industrialis atau agraris, antara pewarisan nilai Islam fundamental atau nilai Islam plural, sampai pada mementingkan pilihan duniawi atau ukhrawi. Penjelasan detail akan disajikan kemudian.

Pokok-pokok Pikiran Pengembangan Pendidikan Islam di Masa Depan

Untuk mengembangkan suatu lembaga pendidikan berikut ini akan digambarkan prioritas penting yang perlu diperhatikan:

Pertama, adanya pemimpin yang mempunyai visi kedepan yang jelas dan bisa mengakumulasikan serta menggerakkan seluruh potensi yang ada baik materiil maupun potensi sumberdaya manusianya (SDM).

Kedua, perlu ditetapkan visi, tujuan dan orientasi lembaga pendidikan yang tegas.

Pendidikan harus diorientasikan kepada kepentingan anak di masa depan bukan mengacu kepada apa yang telah kita peroleh di masa lalu. Karena zaman dan tantangan mereka akan berbeda dengan apa yang kita hadapi sekarang.

Ketiga, adanya sumberdaya pelaksana pendidikan yang berkuwalitas. Kuwalitas itu salah satunya bisa diukur dari tingkat pedidikan dan profesionalitas yang dimiliki oleh pelaksana pendidikan. Idealnya pelaksana pendidikan harus lulus dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari yang ia kelola dan selalau mengembangkan profesionalitanya.

Keempat, terdapatnya dana yang memadahi.

Pembiayaan pendidikan hendaknya ditopang penuh oleh negara. Budget untuk pendidikan harus tinggi minimal 20 persen dari anggaran belanja negara. Sementara ini walaupun Anne Both (dari Australian National University) menyatakan bahwa Indonesia telah sukses melakukan revolusi pendidikan (M. Syafi'i Anwar: 1995, 115-116) namun revolusi itu bukan berarti telah memenuhi kebutuhan pengembangan pendidikan. Budget pendidikan masih berada dibawah 20 persen. Kita lihat saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mislanya perkembangan budget tersebut pada tahunyang silam. Pada *Repelit*a II (1974/1975 - 1978/1979) budget pendidikan sebesar 10.0 persen dari anggaran belanja negara. Repelita III (1979/1980 - 1983/1984) naik menjadi 10.4 persen dan kemudian naik lagi menjadi 14.7 persen pada Repelita IV (1984/1985 - 1988/1989).

Masyarakat sebenarnya telah malakukan gugatan terhadap pemerintah menyangkut tanggung jawabnya yang rendah dalam pembiayaan pendidikan warga, namun sampai sekarang belum ada perbaikan yang signifikan.

Kehendak yang baik baru muncul dalam konstitusi yang merupakan hasil amandemen UUD 1945. Dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen itu disebutkan, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Tetapi, kehendak baik itu baru muncul saat kondisi keuangan negara sedang carut-marut sehingga kita tidak bisa memaksa pemerintah mewujudkan secepatnya, terlepas dari pemerintah masih korup, beban pemerintah menanggung warisan utang rezim Orde Baru (Golkar) amat besar. Pada tahun 2002, misalnya, beban utang yang harus dibayar Rp 132,4 trilyun dengan rincian utang luar negeri Rp 43,9 trilyun, utang dalam negeri Rp 88,4 trilyun (Kompas, 27/4/2002). Dengan kata lain, munculnya kehendak baik itu tidak dibarengi kemampuan pemerintah untuk membiayainya.(Darmaningtyas, Kompas, 12 Desember 2002)

Anggaran yang diberikan pemerintah kepada IAIN seluruh Indonesia menurut suatu sumber sama dengan anggaran satu perguruan tinggi negeri di bawah naungan Diknas. Hal ini merupakan kendala besar didalam merealisasikan pengembangan IAIN saat ini. Lebih detailnya kita lihat saja berapa sebenarnya anggaran yang diberikan ke IAIN seluruh Indonesia berikut ini.

Anggaran belanja Rutin IAIN seluruh Indonesia

Tahun	Jumlah
1986/1987	9.936.974.000,-
1987/1988	11.730.011.000,-
1991/1992	19.868.809.000,-
1998/1999	77.624.537.000,-

Sumber: *Data Statistik Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1988, hal. 29; tahun 1992 hal. 48 dan tahun 2000 hal. 48.*

Dengan demikian dapat kita perkirakan berapa anggaran untuk satu PTN selain IAIN di Indonesia.

Kelima, adanya keteguhan dan semangat tinggi dalam merealisasikan cita-cita dan tujuan pendidikan. Tanpa adanya semangat dan keteghan yang tinggi mustakhil cita-cita dan tujuan pendidikan akan dapat terealisasikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penutup

Perubahan, karena merupaka keniscayaan, harus dihadapi dengan kesiapan. Mempersiapkan anak didik di dunia yang dinamis merupakan tanggungjawab lembaga pendidikan. Memerlukan usaha serius dan konsisten untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dengan keseriusan dan kemauan untuk memulai, diharapkan justru pendidikan yang akan memberikan arah perubahan, bukan perubahan sosial yang mendikte pendidikan melakukan penyesuaian.

Sumber Bacaan

Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam,* Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Anthony Giddens, *Sociology,* Polity Press, Cambridge, 2006.

Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (eds.), *Cendekiawan dan Politik,* LP3ES, Jakarta, 1984.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam,* Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Bassam Tibi, *Aufbruch am Bosporus: Die Türkei zwischen Europa und dem Islamismus,* Diana Verlag, München Zürich, 1998.

Bassam Tibi, *Der Islam und das Problem des kulturellen Bewältigung sozialen Wandels,* Suherkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1985.

Bassam Tibi, *Die Krise des modernen Islams,* Suherkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1991.

Data Statistik Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1988;1992; 2000.

Dieter Baacke, *Einführung in die Außenschulische Pädagogik,* Juventa Paperback, München, 1976.

Edward Craig (ed.), Habermas dalam *Routledge Encyclopedia of Philosophy,* Routledge, London and New York. t(?)

George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia,* Cornell University Press, Ithaca and London, 1970.

Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2007.

Hans Küng, Karl-Josef Kuschel (eds.), *Wissenschaft und Weltethos,* Piper, München Zürich, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Heinz Sünker, Dieter Timmermann, Frtiz-Ulrich Kolbe (eds.), *Bildung, Gesellschaft, soziale Ungleichheit,* Frankfurt am Main, 1994.

I Djumhur dan Drs H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan,* Bandung, tt.

Irianto Saputra Wijaya, *Pendidikan Harus Berorientasi pada Kehidupan Umat Manusia,* Pelita, 17, September 1990.

J.A.K. Thomson, *Aristotle Ethics,* Penguin Book, London, 1976.

J.S. Furnivall, *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India,* New York University Press, 1956.

J.S. Furnivall, *Netherlands India,* Cambridge at the University Press, 1975.

Jürgen Habermas, *Strukturwandel der Öffentlichkeit,* Luchterhand, Neuwied am Rhein und Berlin, 1968.

Kai Hafez (ed.), *Der Islam und der Westen,* Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1997.

Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya,* Logos, Jakarta, 1999.

M. Rusli Karim (ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar,* Rajawali, Jakarta, 1986

M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru,* Jakarta, 1995.

Peter J. Opitz, *Die Dritte Welt in der Krise: Grundprobleme der Entwicklungsländer,* C.H. Beck, München, 1984.

Robert van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite,* The Hague and Bandung, 1960.

Ruggiero Romano dan Alberto Tenenti (ed.), *Welt Geschichte, Die Grundlegung der modernen Welt, Spätmittelalter, Renaissance, Reformation,* Ausburg, 2000.

Samsul Nizar (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidkan Era Rasulullah sampai Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2007.

Sanapiah Faisal, *Sosiologi Pendidikan,* Usaha Nasional, Surabaya, tt.

S.I. Poeradisastra, *Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Peradaban Modern,* P3M, Jakarta, 1986.

Sigrid Brandt, *Religiöses Handeln in moderner Welt,* Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia,* Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Soerjono Soekamto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992

Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam,* Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Suwito dan Fauzan (eds.)., *Sejarah Sosial Pendidikan Islam,* Kencana, Jakarta, 2005.

Torsten Husén, *The School in Question,* New York, 1979.

Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam,* Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

..oo00oo..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id